



Implementasi Kebijakan Melalui Model MSN Approach pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkalis

Siti Zaleha Kurnia Putri¹ Dadang Mashur²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: sitizalehaakurniaputri@gmail.com¹

Abstract

This research is motivated by the ongoing waste management issues faced by local governments. One of the regions experiencing this problem is Mandau District, which produces 30,131.40 tons of waste annually. The waste generated by the community is disposed of at the Final Processing Site (TPA) located on Rangau Street, Bathin Solapan District. This study aims to analyze the Policy Implementation Model through the MSN Approach in waste management carried out by the Technical Implementation Unit for Waste Management in Mandau and Bathin Solapan Districts, Bengkalis Regency. The research uses a qualitative method with data collected through in-depth interviews with UPTD Waste Management officers, observation, and documentation. This study applies the Implementation Theory by Kadji (2015), which includes three main indicators: the Mentality Approach, System Approach, and Networking Approach. The findings reveal that the implementation of waste management policies in Bengkalis Regency has not yet been optimal. The mentality approach is hindered by low public awareness and participation, the system approach requires more structured planning and coordination, while the networking approach demands strong collaboration between the government, community, and private sector. The main obstacles include low staff motivation, lack of public participation, limited facilities, unstructured implementation strategies, and budget constraints. Capacity building and synergy among stakeholders are needed to overcome these challenges.

Keywords: Policy implementation, MSN Approach Model, Waste Management, UPTD Waste Management



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh banyak wilayah, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, seperti Kabupaten Bengkalis. Bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan berdampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Namun, sistem pengelolaan sampah yang ada sering kali belum mampu mengimbangi pertumbuhan ini, sehingga menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran lingkungan, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas hidup secara umum (World Bank, 2022). Kabupaten Bengkalis, terletak di Provinsi Riau, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang dihasilkan oleh penduduknya terus meningkat. Hal ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) yang lebih modern dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik.

Di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, dua kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Kabupaten Bengkalis, pengelolaan sampah menjadi tantangan yang semakin kompleks. Sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang belum memadai menyebabkan sampah sering kali menumpuk di lingkungan pemukiman, menimbulkan bau tidak sedap, serta mencemari tanah dan air. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat upaya pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Berdasarkan laporan tahun 2019, Kecamatan Mandau seharusnya memiliki 9 tempat penampungan sementara (TPS). Akan tetapi, pengamatan langsung menunjukkan hanya ada 4 TPS yang aktif, yang berlokasi di area Sebang, pasar Mandau, depan Gereja di Hangtuah, dan Polsek Mandau. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah masih jauh dari memadai untuk menampung timbulan sampah yang terus meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Model MSN. Diketahui bahwa Model MSN (Mentality, System, dan Networking) Approach ini, menekankan pentingnya peran masyarakat, optimalisasi sumber daya yang ada, serta penanaman nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Dengan melibatkan masyarakat melalui edukasi dan kampanye kesadaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada, pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan (M. Mulyadi et al., 2021). Permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau dapat dilihat dari indikator seperti banyaknya timbulan sampah, masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah, terbatasnya jumlah tempat pembuangan akhir sampah, serta permasalahan pada lembaga dan biaya pengelolaan sampah. Permasalahan sosial timbul karena adanya kesenjangan antara nilai, moral, pranata sosial dengan kenyataan, realita atau situasi yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Masalah sampah di Kecamatan Mandau selama ini dikelola oleh UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kebersihan kota, pasar, jalan, dan lingkungan. Namun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya dana, SDM, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga beberapa wilayah atau Kawasan di Kabupaten Bengkalis tepatnya di Kecamatan Mandau masih tampak sampah berceceran tidak terangkut yang apabila dibiarkan akan menimbulkan berbagai dampak negative baik dari segi ekologi, estetika, dan pada akhirnya berpengaruh pada kualitas lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Masalah yang timbul di Kecamatan Mandau adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah baik yang berasal dari rumah tangga, industri maupun umum. Mekanisme pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau berupa sampah-sampah yang telah dikumpulkan di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kemudian sampah tersebut diangkut menggunakan mobil dumptruk kemudian sampah tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), setelah sampai di TPA sampah-sampah tersebut dibiarkan dan diratakan sama alat berat saja. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia umumnya terdapat dua proses pengelolaan sampah, yaitu system *Sanitary Landfill* dan system *Open Dumping*. Sistem *Sanitary Landfill* adalah system pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah kesuatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut dan kemudian menutupnya dengan tanah. Sedangkan *Open Dumping* adalah system pembuangan sampah dengan cara membuang sampah begitu saja ditanah lapang terbuka tempat pembuangan akhir tanpa adanya tindak lanjut sehingga dinilai dapat menimbulkan dampak negative yang lebih luas (Susanti et al., 2016).

Pendekatan berbasis Model MSN relevan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di wilayahnya. Pemerintah daerah telah mencanangkan beberapa program, seperti peningkatan kapasitas petugas kebersihan, pengadaan fasilitas daur ulang, dan edukasi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (BPS Kabupaten Bengkalis, 2023). Melalui penelitian ini, implementasi Model MSN Approach dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan akan dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keterlibatan masyarakat, efektivitas alokasi sumber daya, serta tantangan dan peluang yang ada dalam konteks lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal ini, masyarakat harus diawasi oleh otoritas setempat. Dalam studi ini, pemerintah kecamatan ingin memajukan pengelolaan sampah agar permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik. Partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pentingnya pembagian masyarakat bagi keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah terutama bergantung pada sistem pemerintahan daerah itu sendiri. Dari segi organisasi, pemerintah daerah merupakan organisasi sistem terbuka (open system), Instansi pemerintah seperti ini lebih baik dalam mengimpor energi dari lingkungan (energy import) dan dapat berfungsi dengan baik. Harus saling melengkapi dalam melakukan kegiatan khususnya pengelolaan sampah pemerintah tidak mampu berdiri sendiri masyarakat pun membutuhkan dukungan pemerintah. Dari beberapa masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti yakin bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Sebagaimana baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan terwujud.

Kerangka Teori Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Tidak lebih, tidak kurang Ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan publik: implementasi langsung dalam bentuk program atau pengembangan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik. Dari program hingga proyek hingga kegiatan, rantai implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas. Van Meter

dan Van Horn dalam Winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan- keputusan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Model Impementasi Kebijakan melalui MSN Approach Merupakan suatu model yang dikembangkan oleh Kadji (2015) mengungkap “bahwa realitas sebuah kebijakan yang akan dimplemnetasikan akan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi policy on stakeholders, yaitu governments, private sector, dan chief society”.

Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang- Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Menurut Sucipto (2012:1) sampah adalah bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang pasti menimbulkan sampah. Selain itu Notoatmodjo (2007:187) mendefinisikan sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan yang beralamat di jalan Lintas Duri-Dumai. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, Bagian Administrasi UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, Lurah Talang Mandi, Kasi Kesejahteraan Kelurahan Talang Mandi dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran TPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data teori Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019) dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Melalui Model MSN Approach Pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkalis Mentality-Approach

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, pendekatan ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik. Pendekatan ini menilai bagaimana kesiapan mental, sikap, dan komitmen pelaksana kebijakan, mulai dari petugas UPTD hingga partisipasi masyarakat, dalam mendukung tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Sikap merupakan salah satu komponen utama dalam Mentality Approach yang mencerminkan pandangan dan kesiapan individu dalam menjalankan kebijakan. Di UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, sikap petugas dalam menjalankan tugas sangat memengaruhi kualitas layanan pengelolaan sampah. Sikap positif seperti kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dan pelayanan yang baik menjadi dorongan utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, sikap yang kurang responsif atau kurang peduli sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Dalam implementasi kebijakan

pengelolaan sampah, penting untuk mengintegrasikan aspek teknis dengan nilai-nilai sosial demi menciptakan tata kelola yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Selain sikap, perilaku juga menjadi cerminan nyata dari sejauh mana kebijakan diimplementasikan dengan baik. Perilaku petugas dalam menjalankan tugas, seperti ketepatan waktu pengangkutan sampah, pemilahan sampah, dan pengolahan yang sesuai prosedur, sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidakteraturan jadwal pengangkutan dan minimnya penerapan sistem pemilahan sampah. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi., Dengan memperhatikan perilaku pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang berlandaskan kode etik, nilai, dan keberanian menghadapi risiko, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis menjadi semakin kuat. Keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dan komitmen semua pihak dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Dengan sinergi yang baik, diharapkan tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Implementasi pengelolaan sampah ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga menggarisbawahi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Dengan mengacu pada regulasi tersebut, pendekatan yang diterapkan di Kecamatan Mandau menjadi model implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, tanggung jawab menjadi aspek terakhir dalam Mentality Approach yang mencerminkan komitmen individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis, tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak petugas UPTD, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat. Petugas UPTD memiliki tanggung jawab dalam memastikan operasional pengelolaan sampah berjalan dengan baik, sementara masyarakat bertanggung jawab dalam mendukung program dengan membuang sampah sesuai aturan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Tanggung jawab ini mencakup penyusunan regulasi yang mendukung, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya dari sektor swasta. Dengan keterbukaan dalam komunikasi dan pelaksanaan tugas, setiap kendala yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah, menciptakan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Implementasi model MSN Approach dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan menekankan pentingnya pembagian peran yang seimbang dan kolaboratif. Melalui kerja sama yang terstruktur, setiap pihak dapat saling melengkapi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan. Pemerintah berperan sebagai pengarah dan pengawas, masyarakat sebagai pelaksana utama, dan sektor swasta sebagai pendukung fasilitas dan pembiayaan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan efisien, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga. Melalui komitmen tersebut, sistem struktur dan fungsi organisasi menjadi semakin kuat, mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem struktur dan fungsi organisasi memegang peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Sinergi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Melalui koordinasi yang intens, pembagian peran yang jelas, serta keterbukaan dan tanggung jawab dari setiap pihak, tercipta kolaborasi yang solid dalam menjalankan kebijakan. Dengan memperhatikan ketiga aspek dalam Mentality Approach sikap, perilaku, dan tanggung jawab implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Namun, tantangan seperti kurangnya motivasi petugas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, UPTD, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi kebijakan demi terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan yang lebih bersih.

Networking-Approach

Pendekatan ini menitikberatkan pada pentingnya membangun hubungan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan jejaring yang kuat, setiap pihak dapat berkolaborasi secara efektif, saling mendukung, dan memperkuat fungsi masing-masing dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sampah, Networking-Approach memungkinkan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang intens antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana, dan sektor swasta sebagai mitra pendukung. Sinergi ini menjadi pondasi penting dalam penyusunan program-program kebersihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Melalui pendekatan ini, kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dan mitra lainnya.

Penerapan Networking-Approach di Kabupaten Bengkalis juga terlihat dalam upaya membangun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan, seperti program kerja bakti dan musyawarah. Pemerintah membuka ruang partisipasi bagi warga untuk memberikan masukan dan ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, sektor swasta turut mendukung dengan menyediakan fasilitas dan pendanaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah. Selain itu, hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memungkinkan terciptanya pembagian peran yang jelas dan terukur. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan sektor swasta sebagai mitra strategis yang mendukung dengan sumber daya dan teknologi. Dengan adanya pembagian peran ini, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui Networking-Approach, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis semakin menunjukkan efektivitas dan keberlanjutan. Kerja sama yang solid antara berbagai pihak menciptakan sistem yang terkoordinasi dengan baik, mendorong produktivitas layanan, dan menjaga kohesivitas sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadi model yang relevan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya lokal. Kemitraan strategis menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis, khususnya di UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat sipil menjadi pondasi penting untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Melalui kolaborasi yang solid, berbagai program pengelolaan sampah dapat dijalankan secara efektif, seperti pengadaan fasilitas, sosialisasi, dan penerapan sistem pemilahan sampah. Dengan adanya kerjasama yang baik, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diatasi bersama. Kemitraan strategis yang dibangun dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis didasari pada kepercayaan, keterbukaan, dan tujuan bersama. Prinsip-prinsip ini menjadi elemen penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan adanya kepercayaan, setiap pihak merasa yakin bahwa kolaborasi yang dijalankan akan menghasilkan manfaat bersama. Keterbukaan dalam komunikasi juga memastikan bahwa semua aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi dapat disampaikan dan ditanggapi dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja sama yang sehat dan produktif.

Pembagian tugas yang jelas menjadi langkah krusial dalam mewujudkan efektivitas kemitraan ini. Pemerintah berperan sebagai penyedia regulasi dan fasilitator, sektor swasta berkontribusi dalam pelaksanaan teknis dan inovasi, sedangkan masyarakat turut serta dalam pengawasan dan pelaksanaan program di tingkat lapangan. Dengan peran yang terdefinisi dengan baik, potensi tumpang tindih tanggung jawab dapat diminimalisir, sehingga setiap pihak dapat berfokus pada bidangnya masing-masing dan berkontribusi secara optimal. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Melalui forum diskusi dan pertemuan rutin, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan, mengevaluasi capaian, dan mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan. Proses ini juga memungkinkan adanya penyempurnaan strategi agar program pengelolaan sampah dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Kemudian, Sinergitas dalam implementasi kebijakan melalui model MSN Approach pada pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan program. Model MSN Approach yang terdiri dari Mentality, System, dan Networking menuntut adanya keterpaduan antara berbagai pemangku kepentingan, kebijakan, dan sumber daya. Sinergitas ini terlihat dari bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, sinergitas diwujudkan melalui integrasi kebijakan berbasis data, optimalisasi sumber daya, dan koordinasi lintas sektor. Proses sinergitas ini diperkuat melalui forum diskusi dan pertemuan rutin yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Melalui mekanisme ini, setiap pihak dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis. Sinergitas menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis, khususnya di UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Aspek kelembagaan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan kerja yang produktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kelembagaan yang kuat memungkinkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pelaksanaan kebijakan berjalan terstruktur dan terkoordinasi. Dengan adanya sinergitas kelembagaan, setiap pihak memahami posisi dan kontribusinya dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif.

Partisipasi aktif berbagai pihak dalam proses perencanaan dan penganggaran menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan program.



Melalui mekanisme ini, setiap stakeholder dapat menyampaikan masukan dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Berikutnya, Simbiosis mutualisme menjadi landasan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis, khususnya di UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang saling membutuhkan menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah memerlukan dukungan dari sektor swasta dalam hal pendanaan, teknologi, dan inovasi, sementara masyarakat sipil berperan dalam partisipasi aktif dan pengawasan. Sebaliknya, sektor swasta dan masyarakat memerlukan regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah untuk dapat berkontribusi secara maksimal.

Prinsip saling menguntungkan dalam simbiosis mutualisme tercermin dalam upaya bersama untuk menciptakan tata kelola sampah yang lebih baik. Dengan adanya kebijakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, pemerintah dapat mengurangi beban operasional dalam pengelolaan sampah, sektor swasta memperoleh manfaat ekonomi melalui pengelolaan limbah yang bernilai, dan masyarakat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Implementasi kebijakan yang melibatkan keuntungan bagi semua pihak ini mendorong terciptanya komitmen jangka panjang dalam pelaksanaan program. Aspek saling mendukung menjadi kekuatan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat memungkinkan terciptanya sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dukungan yang diberikan dapat berupa penyediaan fasilitas, penyuluhan, atau pendampingan dalam pengelolaan sampah, sehingga setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan program. Melalui prinsip simbiosis mutualisme ini, implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi lebih inklusif dan efektif. Hubungan yang didasari oleh kebutuhan, manfaat, dan dukungan bersama menciptakan iklim kerja sama yang harmonis, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik dapat tercapai dengan optimal. Melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, terlihat bahwa sinergi antara lembaga, optimalisasi sumber daya, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia regulasi, sektor swasta mendukung melalui teknologi dan pendanaan, sementara masyarakat berkontribusi dalam implementasi dan pengawasan program.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Melalui MSN Approach Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkalis

Implementasi kebijakan melalui Model MSN Approach ini menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang optimal. Berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antar pihak menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Hambatan-hambatan ini tidak hanya menghambat efektivitas program, tetapi juga memperlambat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berdasarkan studi kasus di UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, serta hasil wawancara dengan Bapak Harzulkifli, SH selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi:



1. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program pengelolaan sampah masih rendah. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat masih sangat minim. Hal ini terlihat dari kebiasaan warga yang masih sering membuang sampah sembarangan, bahkan di area yang telah disediakan fasilitas seperti bak sampah.
2. Minimnya Motivasi Petugas Kebersihan. Petugas kebersihan sering kali menghadapi beban kerja yang berat dengan fasilitas dan insentif yang kurang memadai, sehingga berdampak pada menurunnya semangat kerja mereka dalam menjalankan tugas. Dengan jumlah personel yang terbatas dan area kerja yang luas, petugas kebersihan sering kali kewalahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, insentif yang diberikan kepada petugas kebersihan dinilai belum sepenuhnya memadai, baik dari segi jumlah maupun bentuk apresiasi lainnya. Kondisi ini berdampak pada menurunnya motivasi mereka dalam menjaga kualitas kebersihan lingkungan. Padahal, peran petugas kebersihan sangat vital dalam mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah melalui Model MSN Approach.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Fasilitas pendukung seperti armada pengangkut sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), dan alat pengolahan sampah belum memadai, sehingga proses pengelolaan sampah menjadi terhambat. Keterbatasan armada pengangkut sampah, di mana jumlah kendaraan yang tersedia tidak sebanding dengan volume sampah yang harus diangkut setiap harinya. Bahkan, beberapa armada yang ada sudah dalam kondisi kurang layak pakai, sehingga sering mengalami kerusakan dan memperlambat proses pengangkutan. Selain itu, keterbatasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) juga menjadi kendala yang signifikan. TPS yang tersedia belum tersebar secara merata di wilayah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membuang sampah pada tempat yang semestinya. Akibatnya, banyak warga memilih untuk membuang sampah di lokasi yang tidak sesuai, yang akhirnya memperparah permasalahan kebersihan lingkungan.
4. Perencanaan yang Belum Optimal. Strategi pelaksanaan kebijakan belum terstruktur dengan baik, termasuk dalam hal sosialisasi, pembinaan masyarakat, dan penegakan aturan terkait pengelolaan sampah. Hingga saat ini, penyusunan strategi yang terstruktur belum sepenuhnya terealisasi, sehingga pelaksanaan program sering kali kurang optimal. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan tenaga kerja yang tersedia, membuat sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Dengan dana operasional yang minim, upaya penyuluhan dan edukasi tentang pengelolaan sampah sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5. Minimnya Anggaran. Keterbatasan dana operasional menjadi kendala dalam pengadaan sarana dan pelaksanaan program edukasi serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Anggaran yang diterima UPTD Pengelolaan Sampah sangat terbatas, sehingga berdampak langsung pada pelaksanaan program dan pengadaan sarana pendukung. Banyak program yang telah direncanakan sering kali terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana tersebut. Kondisi ini juga memengaruhi pengadaan fasilitas yang memadai, seperti armada pengangkut sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), dan alat pengolahan sampah. Dengan fasilitas yang belum mencukupi, efektivitas pengelolaan sampah menjadi terganggu, yang pada akhirnya memperburuk permasalahan kebersihan di wilayah tersebut.

6. Koordinasi yang Kurang Efektif. Sinergi antara pemerintah daerah, UPTD, dan pihak terkait lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta belum optimal, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan kurang terintegrasi. Koordinasi antara UPTD dengan dinas terkait dan stakeholder lainnya belum berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program di lapangan sering kali kurang terintegrasi dan tidak selaras dengan kebijakan yang telah dirancang. Kendala dalam menyelaraskan program dan tindakan di lapangan berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Misalnya, distribusi sarana dan prasarana, sosialisasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan program edukasi sering kali terhambat karena kurangnya komunikasi dan kerja sama antarinstansi. Akibatnya, target kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah menjadi sulit tercapai.
7. Minimnya Keterlibatan Pihak Ketiga. Dukungan dari sektor swasta dalam bentuk CSR atau kemitraan pengelolaan sampah masih terbatas, padahal kolaborasi ini penting untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah. Keterlibatan pihak swasta, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kemitraan, masih sangat terbatas. Padahal, kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Keterbatasan kerja sama dengan sektor swasta menyebabkan banyak potensi bantuan, baik dalam bentuk pendanaan, sarana, maupun program edukasi, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya keterlibatan swasta, pengadaan fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan armada pengangkut sampah bisa lebih terbantu, begitu juga dengan pelaksanaan program pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis belum optimal. Mentality-approach terkendala rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, system-approach membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang lebih terstruktur, sementara networking-approach memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hambatan utama meliputi rendahnya motivasi petugas, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana, strategi pelaksanaan yang belum terstruktur, dan keterbatasan anggaran. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan sinergi untuk mengatasi kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kabupaten Bengkalis. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Bengkalis 2023*. Retrieved from <https://bengkaliskab.bps.go.id/id/publication/2023/12/28/e22ebfaa185527630c1e5204/statistik-daerah-kabupaten-bengkalis-2023.html>
- Chandra, B. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC.
- Dinda. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fatihah, K. (2023). *Analisis Pengelolaan Sampah Di Sekolah Menengah Adiwiyata Di Kota Jambi*. (Doctoral dissertation, Universitas Sriwijaya).
- Hidayat, A. J., and Ardillah, Y. (2022). *Sistem Pengelolaan Sampah Di Pasar Rakyat Betung Kabupaten Banyuasin*. Undergraduate Thesis, Sriwijaya University.
- Ikbar, Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Refika Aditama.



- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kardono, K. (2007). Integrated solid waste management in Indonesia. In Proc. *International Symposium on EcoTopia Science 2007*, 629–633.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Kinerja*. Retrieved from <https://www.menlhk.go.id/work-plan/laporan-kinerja-2023-klhk/>
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, M., Wahyudi, R., Khristiana, Y., and Sapariyah, R. A. (2021). Pengelolaan Sampah Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Bank Sampah “Berkah Mina” Surakarta. *WASANA NYATA*, 5(2), 50–55. Retrieved from https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/wasana_nyata/article/download/1076/757
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- Solichin, A. W. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara (E. 2 (ed.))*. Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Belajar.
- Sucipto. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryo, S. T. (2021). *Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Susanti, E. Y., Adhi, S., and Dzunuwanus, G. (2016). Analisis Faktor Penghambatpenerapan Kebijakan Sanitary Landfill Di Tpa Jatibarang Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(03), 371–383. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/12444/12076>
- Tangkilisan. (2003). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Grasindo.
- Ulfa, A., and Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(1), 862–875. Retrieved from <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/1186/929>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Buku Kita.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- World Bank. (2022). *World Bank Approves US\$20 Million Regional Grant for ASEAN to Combat Marine Plastic Pollution in Southeast Asia*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/22/world-bank-approves-us-20-million-regional-grant-for-asean-to-combat-marine-plastic-pollution-in-southeast-asia>